



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

Daftar Isi

Halaman Cover	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Kata Pengantar	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Tugas dan Fungsi.....	I-2
1.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.....	I-4
1.2. Isu-isu Strategis.....	I-5
1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	I-5
1.3.1. Sumber Daya Manusia.....	I-5
1.3.2. Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024.....	I-7
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-9
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	II-9
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	II-10
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	II-10
2.4. Perjanjian Kinerja	II-16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025:	III-2
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2023, 2024, 2025).....	III-2
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	III-3
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 dan alternatif solusi yang telah dilakukan.....	III-3
3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-4
3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-4
3.2. Realisasi Anggaran	III-6
BAB IV PENUTUP	i
4.1. Kesimpulan	i
4.2. Rekomendasi	i
Lampiran	IV-2
1. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2025 dan PK 2026.....	IV-2
2. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan 2025 dan Renja 2026	IV-2
3. Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029	IV-2
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025-2029	IV-2
5. Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja 2025-2029	IV-2
6. Rencana Aksi Tahun 2026	IV-2

Daftar Tabel

Tabel 1.3.1 SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berdasarkan Golongan)	I-5
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja	II-9
Tabel 2.2. strategi dan arah kebijakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.....	II-10
Tabel 2.3.1 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran tahun 2024	II-11
Tabel 2.3.2 Penjabaran Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025	II-11
Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025.....	II-16
Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	II-16
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	III-1
Tabel 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	III-2
Tabel 3.1.2. Trend Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024	III-2
Tabel 3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	III-3
Tabel 3.1.4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 dan alternatif solusi.....	III-4
Tabel 3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	III-4
Tabel 3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	III-5
Tabel 3.2. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	III-6

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar	I-1

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam d o k u m e n rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar, 2026
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR



YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201251992031004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 104 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja serta Uraian Tugas sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

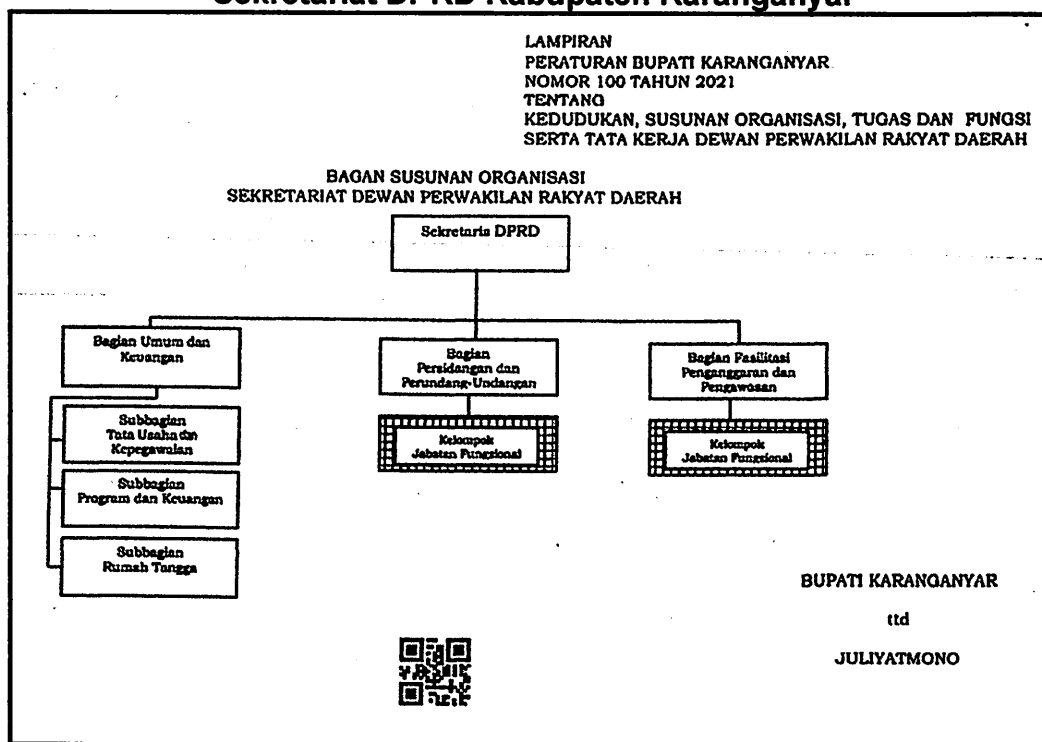
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Tata Usaha dan kepegawaian;
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
 - a. Membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
 - a. Membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar



1.1.1. Tugas dan Fungsi

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan .

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan kepegawaian DPRD;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan dan risalah DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi kegiatan dan keuangan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi rumah tangga;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi kajian Perundang Undangan;
- f. Penyelenggaraan administrasi human protocol dan publikasi;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi penganggaran;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan;
- i. Penyelenggaraan Kerjasama dan aspirasi;
- j. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;
- k. Pelaksanaan Tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana pelayanan kegiatan umum dan keuangan serta kesekretariatan DPRD;

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi
 - a) Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b) Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - c) Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - e) Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi fraksi DPRD;
 - g) Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
 - h) Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - i) Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
 - j) Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - k) Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - l) Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 - m) Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - n) Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - o) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - p) Pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - q) Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r) Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - s) Pengkoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - t) Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - u) Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

- v) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.
- b. Kepala Subbagian program dan keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum, mempunyai tugas:
- a) Menyusun bahan perencanaan;
 - b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun Perubahannya;
 - c) Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - d) Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - e) Merencanakan pemverifikasian keuangan;
 - f) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - g) Mengkoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengajuan surat permintaan Pembayaran (SPP) dan belanja dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP/Ganti Uang Persediaan (GU)/ Tambahan Uang Persediaan (TU)/ Belanja Langsung (LS);
 - h) Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - i) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - j) Merencanakan penatausahaan keuangan;
 - k) Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - l) Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan;
 - m) Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - n) Menganalisa laporan keuangan;
 - o) Menganalisa laporan kinerja;
 - p) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
- a) Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
 - b) Melaksanakan kearsipan;
 - c) Menyusun administrasi kepegawaian;
 - d) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f) Menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.
- d. Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas
- a) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - b) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - c) Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - d) memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - e) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - f) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - g) Merencanakan pemeliharaan alat alat perlengkapan;
 - h) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - i) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di sekretariat DPRD;
 - j) mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - k) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan Gedung.

2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan mempunyai tugas

- a. Pelaksanaan pelayanan kegiatan persidangan dan perundang undangan DPRD;
- b. Penyelenggaraan kajian perundang undangan;
- c. Fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Reperda Inisiatif;
- e. Pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisa produk penyusunan peraturan perundang undangan;
- f. Pengumpulan nahan penyiapan perundang undangan;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. Penyusunan risalah rapat;
- i. Pengkoordinasian pembahasan Raperda;
- j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- k. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- l. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- m. Penyelenggaraan publikasi;
- n. Penyelenggaraan keprotokolan;
- o. Pelaksanaan tugas lain sesuai fungsinya.

3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas

- a. Pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Olafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi dan koordinasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);
- d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi;
- f. Pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- g. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penegakan kode etik DPRD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pokok pikiran DPRD;
- m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama Daerah;
- n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Jumlah jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD Kabupaten Kranganyar ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam

- kelompok sesuai dengan bidanag keahliannya. Jenis dan jenjang Fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) Bidang.
 4. Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum.

1.2. Isu-isu Strategis

Isu Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dirumuskan sebagai kondisi dimana belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut dijabarkan di masing-masing bagian dan dapat dimunculkan sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi Umum adalah bagaimana memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD serta memberikan fasilitasi terkait pendanaan terhadap agenda DPRD yang benar dan cepat dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku,
2. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan adalah bagaimana memberikan penyiapan fasilitasi yang cepat dan cermat terhadap kegiatan sidang DPRD dari sisi bahan, notulensi dan pendokumentasian risalah, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan produk hukum serta memberikan fasilitasi terkait keprotokoleran, dokumentasi, dan publikasi kehumasan agenda DPRD,
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan adalah bagaimana memberikan fasilitasi yang cepat dan cermat terhadap kegiatan alat kelengkapan DPRD yang berkaitan dengan penganggaran dan pengawasan mulai dari bahan hingga notulensi / laporan.

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2025, jumlah pegawai tercatat sebanyak 27 orang dengan distribusi yang didominasi oleh pegawai non eselon, khususnya pada kategori fungsional umum sebanyak 19 orang. Pegawai eselon relatif sedikit dengan rincian golongan IV/a sebanyak 3 orang, III/d sebanyak 2 orang, serta tambahan 1 orang pada golongan III/b. Sementara itu, pegawai fungsional khusus berjumlah 3 orang yang tersebar pada golongan IV/a dan III/d. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Sekretariat DPRD Karanganyar lebih banyak ditopang oleh pegawai non eselon, sehingga peran staf fungsional umum masih sangat dominan dibandingkan pejabat struktural maupun fungsional khusus :

Tabel 1.3.1
SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
(Berdasarkan Golongan)

Golongan	Eselon				Non Eselon	
	IV.A	III.B	III.A	II.B	Fungsional Khusus	Fungsional Umum
IV/e						
IV/d						
IV/c						
IV/b			1			
IV/a	3				1	1
III/d	1				2	4
III/c						
III/b						1
III/a						5
II/d						3

Golongan	Eselon				Non Eselon	
	IV.A	III.B	III.A	II.B	Fungsional Khusus	Fungsional Umum
III/c						3
II/b						1
II/a						1
I/d						
I/c						
I/b						
I/a						
JUMLAH	4		1		3	19
Total					27	

1.3.2. Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, postur anggaran di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- Belanja operasional sebesar Rp 70.961.915.307,00
- Belanja modal sebesar Rp 2.544.857.900,00

Sehingga secara keseluruhan total anggaran di Tahun 2025 adalah Rp 73.506.773.207,00

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis dan permasalahan utama, dasar hukum, dan sistematika penulisannya.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi anggaran. Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan Analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional(jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selanjutnya, pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan merumuskan langkah perbaikan kedepan (rekomendasi).

LAMPIRAN

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya sebagai pendukung capaian kinerja.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Berikut adalah rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggungjawab
1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi untuk dapat memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai.	Menyusun laporan realisasi kinerja secara rutin berkala (bulanan/tri bulanan) atas seluruh komponen rencana aksi dari kegiatan/sub kegiatan di Setwan melalui aplikasi smartsakip dan e monev	Sekretaris DPRD
2	Memperbaiki SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja dengan berkoordinasi dengan bagian organisasi. Dalam SOP agar dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang.	Mengajukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja ke bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar	Sekretaris DPRD
3	Mengajukan permintaan reviu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.	Permintaan reviu dokumen LKJIP tahunan Setwan kepada Inspektorat	Sekretaris DPRD
4	Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi smartsakip sebagai acuan dalam pemberian reward dan punishment	Menyesuaikan dengan peraturan pemberian reward dan punishment bagi seluruh ASN berdasarkan realisasi kinerja yang telah tercapai sebagaimana tertuang di aplikasi smartsakip dengan pencapaian target kinerja OPD yang harus 100% untuk menjadi penentu penuhnya nominal TPP yang diterimakan.	Sekretaris DPRD
5	Menyajikan analisis pencapaian kinerja pada level program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada laporan kinerja secara rinci	Menjelaskan dalam Bab III revisi LKJIP Setwan Tahun 2024 pada nomor 6 tabel 3.1.6 tentang analisis secara rinci pada level program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja	Sekretaris DPRD
4	Menyajikan analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Laporan kinerja secara rinci	Menjelaskan dalam Bab III revisi LKJIP Setwan Tahun 2024 pada nomor 7 tabel 3.1.7 tentang analisis secara rinci pada level program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja	Sekretaris DPRD

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berikut adalah langkah perbaikan di internal Sekretariat DPRD terkait dengan saran/rekomendasi penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD khususnya di Tahun 2025 dan tahun tahun berikutnya pada umumnya:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggungjawab
1.	<p>Dalam hal Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di masa mendatang menuntut adanya obyektivitas penyusunan dan perencanaan anggaran.</p> <p>b. Dituntut pula penetapan program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas.</p>	<p>Mengikuti aturan yang tertuang di dalam Permendagri tentang penyusunan dan perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD agar terhindar dari subyektivitas yang akan berdampak pada lemahnya skala prioritas dalam penetapan kegiatan/sub kegiatan yang tepat untuk menjalankan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD.</p>	Sekretaris DPRD
2.	<p>Dalam hal Penyerapan Anggaran:</p> <p>a. Meningkatkan kuantitas penyerapan anggaran dengan memperhatikan program/ kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan sesuai anggaran kas.</p> <p>b. Melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan secara merata pada setiap tri wulan anggaran sehingga tidak menyebabkan pada akhir tahun anggaran terjadi pelaksanaan belanja kegiatan/sub kegiatan yang sangat padat.</p>	<p>Menyusun kebijakan untuk menerapkan skala prioritas dalam penyusunan perubahan anggaran dengan memperhatikan waktu dan kepentingan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sehingga terhindar dari lemahnya penyerapan anggaran.</p>	Sekretaris DPRD
3.	<p>Dalam hal Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran</p> <p>a. Meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran sehingga akan menciptakan tertib administrasi dan tertib keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Menyusun kebijakan dalam hal tertib administrasi penatausahaan keuangan terutama untuk penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan yang berlaku tanpa terkecuali.</p>	Sekretaris DPRD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPD Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2023, yang didalamnya mencakup tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah kebijakan, Program dan kegiatan/sub kegiatan.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan amanat pembangunan Kabupaten Karanganyar. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah” yang diwujudkan dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang diselaraskan dengan fungsi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator DPRD, sehingga tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar adalah meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi dengan indikator capaian yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Secara lengkapnya keterkaitan hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	75	80	85	80,75	81,25
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80,43	81,26	81,67	82,75	82,81

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Strategi pencapaian sasaran dari Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pelayanan DPRD yang berkualitas
- b. Meningkatkan fasilitasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kegiatan DPRD terlaksana dengan baik
- c. Pendokumentasian dan sosialisasi Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD yang Tepat Waktu
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
- e. Mengoptimalkan penyusunan Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD Sesuai Peraturan yang Berlaku
- f. Menyusun Laporan laporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Ketentuan yang berlaku
- g. Meningkatnya kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD

Sementara itu, Arah Kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran dijabarkan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Arah kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Penjabaran dari strategi dan arah kebijakan di Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
strategi dan arah kebijakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.	Meningkatkan fasilitasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kegiatan DPRD terlaksana dengan baik	Menciptakan upaya – upaya peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD; Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan penyediaan keperluan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
		Pendokumentasian dan sosialisasi Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD yang Tepat Waktu	
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	
		Mengoptimalkan penyusunan Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD Sesuai Peraturan yang Berlaku	Selalu Update peraturan-peraturan tentang penyusunan laporan-laporan serta penatausahaan keuangan.
		Menyusun Laporan laporan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Ketentuan yang berlaku	
		Meningkatnya kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD	Mengirimkan SDM di Sekretariat DPRD untuk mengikuti diklat, bimtek, workshop, dll untuk peningkatan kapasitas.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 adalah:

Tabel 2.3.1
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran tahun 2024

No	Nama Program	Jumlah kegiatan pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9
2	Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8

- A. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah meliputi 9 (sembilan) kegiatan:
- 1) Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 9) Layanan Administrasi DPRD
- B. Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD meliputi 8 (delapan) kegiatan:
- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 7) Pembahasan kerja Sama Daerah
 - 8) Fasilitasi Tugas DPRD

Untuk lebih rincinya, penjabaran program/kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.2
Penjabaran Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DPRD		100	73.506.773.207
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator IKU SKPD yang tercapai targetnya	100	45.103.685.365
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		287.131.625
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	4	153.675.150
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam 1 tahun	1	4.589.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam 1 tahun	1	4.184.500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1	7.035.250

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
		SKPD dalam 1 tahun		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dalam 1 tahun	1	4.194.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun	3	106.638.675
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	1	6.813.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 1 tahun		4.130.191.983
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 tahun	420	4.085.857.933
	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 tahun	4	44.334.050
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam 1 tahun		1.009.852.250
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam 1 tahun	90	352.598.800
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam 1 tahun	60	98.085.700
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 tahun	60	559.167.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun		1.745.218.975
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	58	169.238.820
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	47	85.288.105
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam 1 tahun	50	322.038.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	1100	139.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam 1 tahun	15	176.830.800
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dalam 1 tahun	6	6.073.400
	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah paket Bahan Atau Material yang disediakan dalam 1 tahun	367	303.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu dalam 1 tahun	12	273.315.000
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam 1 tahun	15	270.434.550
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan dalam 1 tahun		2.596.192.900
	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Pengadaan	2	1.830.931.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan dalam satu tahun		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dalam 1 tahun	10	349.917.500
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dalam 1 tahun	3	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dalam 1 tahun	15	72.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dalam 1 tahun	1	343.344.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun		1.452.189.961
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam 1 tahun	12	334.855.237
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 tahun	5	796.540.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	9	116.100.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	10	204.694.724
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara dalam 1 tahun		2.041.798.005
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 tahun	9	622.909.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dalam 1 tahun	28	626.296.500
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 tahun	18	48.200.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam 1 tahun	200	91.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam 1 tahun	100	316.676.505
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 tahun	150	189.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 tahun	1	147.615.500
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang tercapai dalam 1 tahun		31.115.099.512
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD dalam 1 tahun	630	30.340.487.512
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	701.559.700

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
		dalam 1 tahun		
	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD dalam 1 tahun	45	73.052.300
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun		726.010.154
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD dalam 1 tahun	1	5.607.650
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Fraksi DPRD dalam 1 tahun	1	12.497.400
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dalam 1 tahun	15	707.905.104
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun		28.403.087.842
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Perda Dan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam 1 tahun		2.819.108.300
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam 1 tahun	1	182.897.650
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam 1 tahun	2	578.756.050
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan dalam 1 tahun	2	1.919.779.300
	fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi dalam 1 tahun	2	132.311.800
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	5.363.500
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase rapat pembahasan Kebijakan Anggaran		1.953.667.910
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS dalam 1 tahun	1	390.208.702
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam 1 tahun	1	380.234.452
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD dalam 1 tahun	1	390.232.702
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan dalam 1 tahun	1	385.732.702
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dalam 1 tahun	1	407.259.352
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dalam 1 tahun		2.403.109.306
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dalam 1 tahun	12	99.696.500
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam 1 tahun	12	115.410.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam 1 tahun	12	92.365.400
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dalam 1 tahun	12	107.965.400
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam 1 tahun	1	413.894.050
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran dalam 1 tahun	3	1.158.821.930
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 1 tahun	1	414.956.026
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD Yang Terlayani dalam 1 tahun		5.368.305.298
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD dalam 1 tahun	6	2.561.167.400
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli dalam 1 tahun	7	188.499.338
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dalam 1 tahun	6	229.449.450
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan dalam 1 tahun	25	414.394.200
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dalam 1 tahun	2	30.969.352
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD dalam 1 tahun	1	1.943.825.558
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosesentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana dalam 1 tahun		4.632.867.952
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD dalam 1 tahun	1	154.263.500
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun dalam 1 tahun	1	414.395.152
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dalam 1 tahun	3	4.064.209.300
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dalam 1 tahun		272.090.300
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD dalam 1 tahun	1	79.966.800
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil pengawasan kode etik DPRD dalam 1 tahun	1	192.123.500
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen pembahasan kerja sama daerah dalam 1 tahun		18.608.000
	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah dalam 1 tahun	1	6.458.400
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan publikasi yang disusun dalam 1 tahun	1	12.149.600
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang diselenggarakan dalam 1 tahun		10.935.330.776
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dalam 1 tahun	28	9.066.942.500

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun dalam 1 tahun	12	40.105.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dalam 1 tahun	12	27.797.050
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dalam 1 tahun	20	1.800.485.726

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar untuk mewujudkan target kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, Renstra OPD Tahun 2024-2026, IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sakip OPD Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai Indeks	81,25 82,81

Tabel 2.4.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Perubahan Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	86
	Sasaran: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP OPD • Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • 81,25 • 82,81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar adalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan Tahun 2025 dengan realisasi keuangannya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui kinerja, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD telah mendapatkan pencapaian kinerja yang dapat dijelaskan di dalam tabel berikut:

Di dalam tabel diatas, capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan/SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realiasi	Persentase	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	Indeks	86,00	85,74	99,69	86,00
	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	81,25	71,40	88,00	81,75
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	82,81	78,42	95,00	82,91

Di dalam tabel diatas, capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025:

Tabel 3.1.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	86,00	85,74	99,69	Baik	
2	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	81,25	71,40	88,00	Butuh Perbaikan	LHE AKIP Tahun 2024
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,81	78,42	95,00	Butuh Perbaikan	Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, dapat dijelaskan masing masing indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Indikator Sasaran: nilai SAKIP perangkat daerah, target 81,25; realisasi 71,40, pencapaian 88%.
- 2) Indikator sasaran: Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, target 82,81; realisasi 78,425; pencapaian 95 %.

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2023, 2024, 2025)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel 3.1.2.
Trend Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	80	70,91	88	72	85,74	119	86	85,74	99,69
	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	85	69,40	82	85	71,40	84	81,25	71,40*	88
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,67	78,74	96	82,75	87,85	106	82,81	78,42	95

Apabila melihat trend dari target, realisasi dan capain kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2023, 2024, dan 2025, maka dapat disampaikan bahwa:

- 1) Indikator Sasaran: nilai SAKIP perangkat daerah, target terus meningkat sesuai harapan semakin baik dari tahun ke tahun. Tetapi, dari realisasi dan pencapaian

- terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2025.
- 2) Indikator sasaran: Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, target target terus meningkat sesuai harapan semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan realisasi dan pencapaian yang terus meningkat pula dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun di tahun 2025 terdapat penurunan indeks hasil survei kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dikarenakan ada perubahan target responden dari responden umum (Anggota DPRD dan masyarakat pemakai layanan Sekretariat DPRD) menjadi hanya Anggota DPRD saja, sehingga terjadi trend respon rate rendah yaitu penurunan jumlah responden yang mempengaruhi hasil perhitungan indeks menjadi turun.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.1.3.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	85,74	75	114
2	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	71,40*	81,75	87,00
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	78,42	82,91	95,00

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pertama yaitu nilai SAKIP OPD (Sekretariat DPRD) adalah 71,40. Hal ini mendorong tingkat kemajuan dalam hal akuntabilitas kinerja setwan sebagai organisasi perangkat daerah meski belum bisa optimal sampai seratus persen. Setidaknya, sudah tercapai kemajuan sebesar 87 % (delapan puluh tujuh persen) dari target akhir renstra tahun 2026. Sementara untuk realisasi indikator yang kedua yaitu indeks kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD melebihi dari target akhir renstra tahun 2026 yaitu 78,425 lebih kecil dari target akhir renstra tahun 2026 sebesar 82,91. Meski begitu, tetap bisa dikatakan bahwa hasil survei tingkat kepuasan anggota DPRD telah mendorong tingkat kemajuan akuntabilitas kinerja Setwan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari target akhir resntra di tahun 2026.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.4.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 dan alternatif solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86,00	85,74	99,69		
2	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	81,25	71,40	88,00	Belum optimalnya manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja) di Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas seluruh aspek di dalam manajemen kinerja sehingga bisa didapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaannya
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82,81	78,42	95,00	Terjadinya penurunan jumlah responden yang mempengaruhi hasil perhitungan indeks survei menjadi rendah	Mengoptimalkan partisipasi target responden (Anggota DPRD) dan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD untuk mendongkrak indeks hasil survei

Dari tabel diatas, Kita dapat melihat bahwa ada kegagalan di dalam memenuhi indikator kinerja yang pertama yaitu nilai SAKIP OPD (Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar) yang untuk Tahun 2025 masih dibawah target. Kemungkinan besar karena belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian akuntabilitas kinerja instansi termasuk belum liniernya keterkaitan antar dokumen tersebut satu dengan yang lainnya. Sementara itu, dalam mencapai indikator kinerja yang kedua yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan hasilnya karena ada penurunan jumlah responden yang hanya dibatasi pada anggota DPRD saja, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi hasil perhitungan indeks di tahun 2025 ini.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pembahasan poin ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.1.5.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	86,00	85,74	99,69	73.506.773.207	65.355.867.392	89,00	112
2	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	81,25	71,40*	88,00	45.103.685.365	39.590.226.260	88,00	100
		82,81	78,42	95,00	28.403.087.842	25.765.641.132	91,00	104

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk lebih detilnya analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Sekretariat DPRD di tahun anggaran 2024 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.6.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	99,69				
2	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	88				
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	95				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator IKU SKPD yang tercapai targetnya	112	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam 1 tahun	134	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	113	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan dalam 1 tahun	136	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun	108	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara dalam 1 tahun	114	Menunjang
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dicapai dalam 1 tahun	99	Menunjang
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun	100	Menunjang
				PROGRAM DUKUNGAN	Presentase Pelaksanaan	101	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun		
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Perda Dan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase rapat pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Menunjang
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dalam 1 tahun	82	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD Yang Terlayani dalam 1 tahun	104	Menunjang
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana dalam 1 tahun	100	Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dalam 1 tahun	50	Menunjang
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen pembahasan kerja sama daerah dalam 1 tahun	0	Tidak Menunjang
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang diselenggarakan dalam 1 tahun	119	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Di dalam poin ini diuraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Selain pertanggungjawaban Capaian Indikator Kinerja Utama di dalam sasaran strategis Tahun 2025, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penyerapan anggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 dibiayai dengan anggaran APBD kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Alokasi pagu anggaran/pendanaan dan realisasi anggaran yang tercantum di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 secara garis besar terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat digambarkan ke dalam tabel 3.2. berikut

Tabel 3.2.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	SEKRETARIAT DPRD	73.506.773.207	65.355.867.392	89%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.103.685.365	39.590.226.260	88%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.131.625	237.786.534	83%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.130.191.983	3.235.789.555	78%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.009.852.250	928.040.240	92%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.745.218.975	1.674.016.400	96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.596.192.900	2.438.580.000	94%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.452.189.961	1.076.602.036	74%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.041.798.005	1.598.286.358	78%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.115.099.512	27.789.602.983	89%
	Layanan Administrasi DPRD	726.010.154	611.522.154	84%
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28.403.087.842	25.765.641.132	91%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.819.108.300	2.389.893.450	85%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.953.667.910	1.903.749.696	97%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.403.109.306	2.208.323.188	92%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.368.305.298	4.927.987.031	92%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.632.867.952	4.509.401.252	97%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	272.090.300	116.036.600	43%
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	18.608.000	2.207.000	12%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10.935.330.776	9.708.042.915	89%

Jika dilihat dari komposisi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar pada serapan anggaran telah merealisasikan serapan anggaran di tahun 2025 hingga mencapai 89 %. Kondisi serapan ini sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran pada Kedua Program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kedepannya sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan, Sekretariat DPRD akan lebih mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD yang antara lain:

1. Melakukan perencanaan kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang lebih matang dan terukur;
2. Memperbaiki perencanaan yang benar benar dibutuhkan dan terukur guna mendukung tugas dan fungsi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Lebih optimal dalam menentukan target kinerja dan pencapaiannya;
4. Mengoptimalkan pendampingan dan fasilitasi dalam DPRD menyusun rencana kerja dan penjadwalan kegiatan-kegiatan DPRD.
5. Mengoptimalkan kerjasama dengan tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan rancangan perda oleh DPRD baik rancangan perda yang diusulkan oleh eksekutif /Bupati maupun rancangan perda yang berasal dari DPRD.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada sistem akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan good governance. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas secara keseluruhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar mendapatkan anggaran sebesar Rp. 73.506.773.207,00 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Hasil pencapaian realisasi anggaran di akhir tahun anggaran 2025 dalam rincian 2 program tersebut adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88 %
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 91%

4.1. Kesimpulan

Dari Hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja Sekretaris DPRD pada Tahun 2025 telah tercapai dengan prosentase 106,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja program/kegiatan telah tercapai bahkan melampaui targetnya.

Namun dalam hal pencapaian indikator kinerja sasaran organisasi yaitu perolehan nilai SAKIP OPD dengan nilai 71.40* (*realisasi tahun 2024) dan hasil survei kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan besaran indeks 78,42. Dari kedua pencapaian indikator kinerja tersebut masih berada dibawah target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Hal ini menjadi perhatian karena tingkat capaian target indikator kinerja sasaran masih di angka 88 % dan 95 %. Ini menunjukkan bahwa harus ada evaluasi secara terinci dan menyeluruh dari semua aspek dalam manajemen kinerja untuk mencapai rumusan perbaikan strategi untuk meningkatkannya agar tercapai targetnya dan mampu mewujudkan optimalisasi manajemen kinerja di Sekretariat DPRD.

4.2. Rekomendasi

Dari penyampaian laporan kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai rekomendasi di dalam manajemen kinerja untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran pada Sekretariat DPRD di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan kinerja:
Agar merencanakan target kinerja pada tingkat program/kegiatan/sub kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara optimal sebagai supporting system pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Dalam hal pengukuran kinerja:
Agar memperhatikan aspek-aspek strategis agar tidak hanya sekedar menghitung cakupan/prosentase/jumlah dan lain-lain di dalam indikator kinerja yang diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kualitas layanan (kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD) dengan cara melakukan survei sejauh mana anggota dewan merasa

- terfasilitasi dengan baik;
- b. Ketepatan waktu (responsivitas) dengan cara menilai kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyediaan data, risalah, dan dokumen persidangan DPRD;
 - c. Kualitas produk administrasi dengan cara menilai akurasi berbagai produk administrasi dari Sekretariat DPRD untuk keperluan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD (sebagai contohnya adalah akurasi draf raperda, dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen penatausahaan keuangan, dan lain sebagainya);
3. Dalam hal pelaporan kinerja dengan cara mengevaluasi kualitas (transparan, akuntabel, dan lengkap) laporan kinerja Sekretariat DPRD agar berorientasi kepada hasil dalam menggambarkan capaian tugas dan fungsinya/kinerjanya;
 4. Dalam hal evaluasi kinerja dengan cara menyampaikan dokumen laporan kinerja organisasi yang berkualitas kepada evaluator (inspektorat daerah) secara tepat waktu
 5. Dalam hal Penyerapan Anggaran:
 - a. Meningkatkan kuantitas penyerapan anggaran dengan memperhatikan program/ kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan sesuai anggaran kas.
 - b. Melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara merata pada setiap tri wulan anggaran sehingga tidak menyebabkan pada akhir tahun anggaran terjadi pelaksanaan belanja kegiatan/sub kegiatan yang sangat padat.
 6. Dalam hal Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran
 - a. Meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran sehingga akan menciptakan tertib administrasi dan tertib keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Karanganyar, 2026
Pit. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR



YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197201251992031004

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2025 dan PK 2026**
- 2. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan 2025 dan Renja 2026**
- 3. Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029**
- 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025-2029**
- 5. Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja 2025-2029**
- 6. Rencana Aksi Tahun 2026**